

POTRET POTENSI KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2015

<http://kepri.bps.go.id>





POTRET POTENSI KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2015

<http://kepriops.go.id>

Potret Potensi Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau 2015

ISBN: 978-602-0979-38-0

Katalog: 5401006.21

No. Publikasi: 21530.1609

Ukuran Buku: 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: xv + 52 halaman

Naskah:

Bidang Statistik Produksi

Penyunting:

Bidang Statistik Produksi

Gambar Kulit:

Bidang Statistik Produksi / Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Dicetak dan Diterbitkan Oleh:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Tim Penyusun

**Potret Potensi Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Riau
2015**

Penanggung Jawab Umum:

Panusunan Siregar

Penanggung Jawab Teknis:

Yan Safrizal

Editor:

Yan Safrizal, Afriani Mahardika

Penulis:

Resa Surya Utama

Desain Buku:

Resa Surya Utama

Gambar Kulit:

Eling Kurnandar

KATA PENGANTAR

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi kepulauan yang menyimpan banyak potensi serta keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan. Potensi ini dapat dimanfaatkan sebagai modal utama pembangunan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejak beberapa tahun terakhir, jumlah rumah tangga usaha perikanan di Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan. Selain itu, produksi perikanan tangkap juga menunjukkan *trend* yang menurun selama 5 tahun terakhir. Hal ini membutuhkan perhatian yang serius, mengingat kebutuhan pangan masyarakat terhadap ikan harus selalu terpenuhi dan tuntutan dari pasar internasional akan hasil perikanan yang berkualitas semakin meningkat.

Publikasi “Potret Potensi Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau 2015” ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang potensi ekonomi kelautan dan perikanan dilihat dari perspektif data statistik. Buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi perencanaan dan evaluasi kebijakan di sektor kelautan dan perikanan.

Kepada semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya buku ini, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk kesempurnaan buku edisi berikutnya.

Tanjungpinang, Desember 2016
BPS Provinsi Kepulauan Riau

Kepala,



Panusunan Siregar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum.....	3
B. Infrastruktur	7
C. Kependudukan	10
D. Ketenagakerjaan	13
BAB II. ULASAN SINGKAT	15
A. Struktur Ekonomi	17
B. Rumah Tangga Perikanan	21
C. Produksi Perikanan	26
D. Ekspor Perikanan	31
E. Kawasan Konservasi Perairan	35
F. Wisata Bahari	38
BAB III. PENUTUP	43
A. RINGKASAN	45
B. SARAN	48
LAMPIRAN	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	4
<i>Luas Wilayah Daratan dan Lantan Kabupaten / Kota di Provinsi Kepulauan Riau</i>	
Tabel 1.2	5
<i>Kabupaten / Kota di Provinsi Kepulauan Riau Menurut Nama Ibukota dan Jarak ke Ibukota Provinsi, 2015</i>	
Tabel 1.3	6
<i>Kabupaten / Kota di Provinsi Kepulauan Riau Menurut Jumlah Wilayah Administratif, 2015</i>	
Tabel 1.4	9
<i>Jumlah Pelanggan dan Produksi Listrik PT.PLN Kepulauan Riau, 2015</i>	
Tabel 1.5	9
<i>Jumlah Pelanggan dan Air Disalurkan di Provinsi Kepulauan Riau, 2015</i>	
Tabel 1.6	11
<i>Persebaran, Kepadatan, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/ Kota, 2015</i>	
Tabel 1.7	13
<i>Jumlah Penduduk Bekerja dan Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/ Kota, 2015</i>	
Tabel 1.8	14
<i>Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Kepulauan Riau, 2015</i>	

Tabel 2.1	18
<i>PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2010 dan 2015</i>		
Tabel 2.2	19
<i>Peran Kategori Pertanian, Kebutuhan, dan Perikanan terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2010 – 2015</i>		
Tabel 2.3	21
<i>Jumlah Rumah Tangga Usaha Perikanan Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2013</i>		
Tabel 2.4	26
<i>Kode dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI)</i>		
Tabel 2.5	30
<i>Rata-Rata Luas Baku Budidaya Ikan Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Budidaya Ikan (m²/ rumah tangga) Tahun 2013</i>		
Tabel 2.6	36
<i>Kawasan Konservasi Perairan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang Dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015</i>		
Tabel 2.7	37
<i>Luas Terumbu Karang dan Luas Mangrove Wilayah Indonesia Tahun 2015</i>		
Tabel 2.8	39
<i>Jumlah Hotel Bintang dan Non Bintang Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2015</i>		

DAFTAR GAMBAR

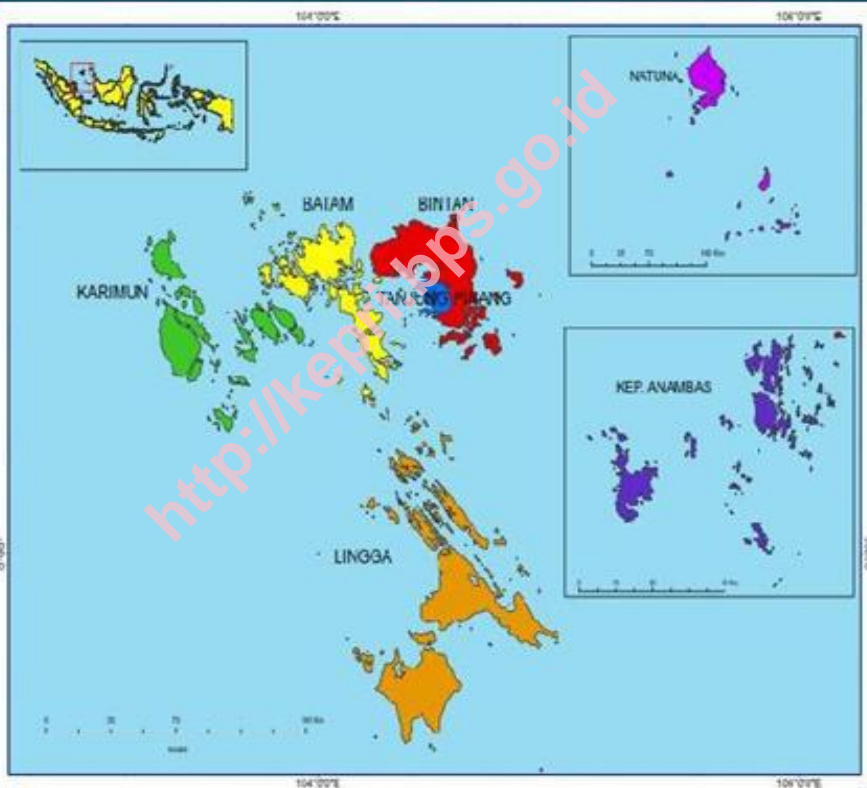
Gambar 1.1	3
<i>Peta Provinsi Kepulauan Riau Menurut Letak Kabupaten/Kota</i>	
Gambar 1.2	7
<i>Panjang Jalan di Provinsi Kepulauan Riau Menurut Tingkat Kewenangannya, 2010-2015</i>	
Gambar 1.3	10
<i>Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, 2015</i>	
Gambar 1.4	12
<i>Piramida Penduduk Provinsi Kepulauan Riau, 2015</i>	
Gambar 2.1	20
<i>Perbandingan Pertumbuhan PDRB, PDRB Sub Kategori Perikanan, dan PDRB Kategori Industri Pengolahan Provinsi Kepulauan Riau, 2011-2015</i>	
Gambar 2.2	22
<i>Persentase Rumah Tangga Perikanan Berdasarkan Jenis Kapal/Perahu Utama yang Digunakan di Laut, Provinsi Kepulauan Riau, 2013</i>	
Gambar 2.3	23
<i>Jumlah Rumah Tangga Perikanan Berdasarkan Jenis Alat Tangkap Utama yang Digunakan di Laut, Provinsi Kepulauan Riau, 2013</i>	
Gambar 2.4	24
<i>Persentase Persebaran Rumah Tangga Usaha Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2013</i>	

Gambar 2.5	25
<i>Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Usaha Perikanan Budidaya Menurut Lokasi Budidaya dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2013</i>		
Gambar 2.6	27
<i>Perbandingan Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Indonesia dan WPP-RI 711 Tabun 2005-2014</i>		
Gambar 2.7	28
<i>Perbandingan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Provinsi-provinsi WPP-RI 711 Tabun 2005-2014</i>		
Gambar 2.8	29
<i>Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Kepulauan Riau Tabun 2005-2014</i>		
Gambar 2.9	31
<i>Volume dan Nilai Ekspor Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Indonesia Tabun 2009-2015</i>		
Gambar 2.10	32
<i>Nilai Total Ekspor (FOB) Kepulauan Riau dan Nilai Ekspor (FOB) Komoditas Ikan dan Udang Kepulauan Riau Tabun 2010-2016</i>		
Gambar 2.11	33
<i>Komoditas Utama Ekspor Hasil Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tabun 2015</i>		
Gambar 2.12	34
<i>Negara Tujuan Utama Ekspor Hasil Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tabun 2010-2015</i>		
Gambar 2.13	38
<i>Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota Tabun 2011-2015</i>		

BAB I

PENDAHULUAN

Provinsi Kepulauan Riau



95 % Luas Wilayah adalah Lautan

1.918 Pulau

Terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota

BAB 1

PENDAHULUAN

"Provinsi Kepulauan Riau akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi bagi Republik Indonesia dimasa depan"



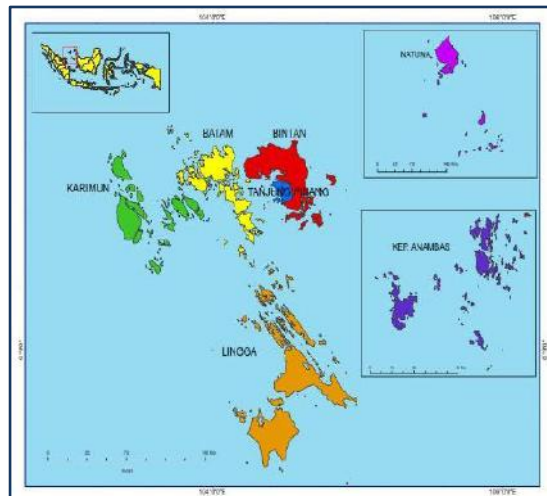
A. Gambaran Umum

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga. Sejak tahun 2008, berdasarkan Undang-undang Nomor 33/2008 terbentuk Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai hasil pemekaran wilayah Kabupaten Natuna.

Sekitar 95 persen wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah lautan dan terdiri dari banyak pulau-pulau yang terbentang dari 00°29' Lintang Selatan - 04°40' Lintang Utara dan 103°22' - 109°4' Bujur Timur. Luas wilayah Kepulauan Riau yang berupa daratan adalah 8.201,72 km².

Gambar 1.1

Peta Provinsi Kepulauan Riau Menurut Letak Kabupaten/ Kota



Taukah Anda ?

*Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi dengan jumlah pulau **TERBANYAK** di Indonesia, yaitu **1.918** pulau*.*

**Data Biro Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau*

Batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah:

- **Utara** dengan Vietnam dan Kamboja
- **Selatan** dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi
- **Barat** dengan Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau
- **Timur** dengan Malaysia, Brunei, dan Provinsi Kalimantan Barat

Luas wilayah daratan masing-masing kabupaten/kota cukup bervariasi. Kabupaten/Kota yang memiliki daratan terluas adalah Kabupaten Lingga, yaitu 2.266,77 km² atau sekitar 27,64 persen dari luas daratan di Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki luas daratan terkecil adalah Kota Tanjungpinang, yaitu sebesar 144,56 km² atau hanya sekitar 1,76 persen dari luas daratan di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 1.1
Luas Wilayah Daratan dan Lautan Kabupaten / Kota di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah	
	Daratan (Km2)	Lautan (Km2)
(1)	(2)	(3)
Kabupaten		
1 Karimun	912,75	4.698,09
2 Bintan	1.318,21	102.964,08
3 Natuna	2.009,04	216.113,42
4 Lingga	2.266,77	43.339,00
5 Kepulauan Anambas	590,14	46.074,00
Kota		
1 Batam	960,25	3.675,25
2 Tanjungpinang	144,56	149,13
Kepulauan Riau	8.201,72	417.012,97

Sumber : Biro Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau

Taukah Anda ?

Lebih dari 98 persen luas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah LAUTAN

Ibukota Provinsi Kepulauan Riau adalah Tanjungpinang, terletak di pulau yang sama dengan Kabupaten Bintan yaitu Pulau Bintan. Jarak dari masing-masing ibukota kabupaten/kota ke Tanjungpinang cukup bervariasi dan sebagian besar harus ditempuh melalui jalur laut atau udara karena letaknya di pulau yang berbeda-beda.

Kabupaten terjauh dari ibukota provinsi adalah Kabupaten Natuna, yaitu dengan jarak sekitar 440 mil ke arah utara kota Tanjungpinang. Kota Batam yang diproyeksikan akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia hanya berjarak 44 mil dari Kota Tanjungpinang dan ditempuh melalui jalur laut.

Tabel 1.2
Kabupaten / Kota
di Provinsi Kepulauan Riau
Menurut Nama Ibukota dan
Jarak ke Ibukota Provinsi, 2015

Taukah Anda ?

Jarak antara
Tanjungpinang dan
kecamatan terjauh di
Kabupaten Natuna
hampir sama dengan jarak
JAKARTA-SURABAYA

Kabupaten/Kota	Ibukota	Jarak ke Ibukota Provinsi (mil)
(1)	(2)	(3)
Kabupaten		
1 Karimun	Tanjung Balai	76
2 Bintan	Bintan Buyu	20
3 Natuna	Ranai	440
4 Lingga	Daik	60
5 Kepulauan Anambas	Tarempa	194
Kota		
1 Batam	Batam	44
2 Tanjungpinang	Tanjungpinang	0
Kepulauan Riau		Tanjungpinang

Sumber : Biro Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau

Sejak berdirinya, Provinsi Kepulauan Riau telah mengalami perkembangan jumlah wilayah administratif yang cukup signifikan. Pada awalnya terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan. Pada tahun 2001 dimekarkan menjadi 10 kecamatan selanjutnya pada tahun 2004 dimekarkan kembali menjadi 17 kecamatan dan tahun 2015 sudah menjadi 70 kecamatan.

Desa/kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan yang merupakan wilayah kerja Kepala Desa/Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Jumlah desa/kelurahan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 adalah 416 desa/kelurahan. Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kabupaten Lingga, yaitu 75 desa dan 7 kelurahan.

Tabel 1.3
Kabupaten / Kota
di Provinsi Kepulauan Riau
Menurut Jumlah Wilayah
Administratif, 2015

Taukah Anda ?

**Jumlah Kecamatan di
Provinsi Kepulauan Riau
relatif sedikit
dibandingkan jumlah
kecamatan di provinsi
lainnya**

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1 Karimun	12	42	29
2 Bintan	10	36	15
3 Natuna	15	70	6
4 Lingga	10	75	7
5 Kepulauan Anambas	7	52	2
Kota			
1 Batam	12	0	18
2 Tanjungpinang	4	0	64
Kepulauan Riau	70	275	141

Sumber : Biro Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau

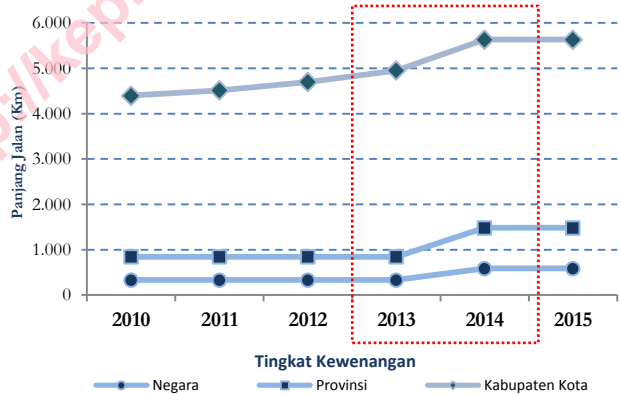
Kepulauan Riau memiliki potensi sumber daya alam mineral dan energi yang relatif cukup besar, dan bervariasi baik berupa bahan galian A (strategis) seperti minyak bumi dan gas alam, bahan galian B (vital) seperti timah, bauksit, dan pasir besi, maupun bahan galian golongan C seperti granit, pasir, dan kuarsa

Sebagian besar tanah di wilayah Kepulauan Riau mengandung bauksit. Meskipun dalam jumlah yang relatif sedikit, lahan yang berpotensi diolah menjadi lahan pertanian tetap tersedia di seluruh wilayah kabupaten/kota se Kepulauan Riau. Hal ini pula yang membuat sektor pertanian, seperti pertanian tanaman pangan dan perkebunan kurang dijadikan mata pencaharian utama oleh sebagian besar penduduk. Akan tetapi, dengan luas lautan yang besar dan letak geografis Kepulauan Riau pada lintasan lalu lintas pariwisata dan perikanan internasional membuat sektor kelautan dan perikanan menjadi 'harta karun' bagi Provinsi Kepulauan Riau.

Sektor kelautan dan perikanan dapat dijadikan daya ungkit perekonomian masa depan, seperti laut dan isinya serta berbagai pantai-pantai eksotis yang dapat dijadikan nilai investasi dan objek wisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

B. Infrastruktur

Sebagai salah satu propinsi termuda di Indonesia, Kepulauan Riau harus menyediakan berbagai infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperluas peluang bagi para investor asing dan domestik untuk menanamkan modalnya di Kepulauan Riau. Oleh sebab itu ketersediaan infrastruktur seperti jalan yang layak diperlukan dalam mempermudah mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas distribusi barang dari suatu daerah ke daerah lain. Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yuhoyono mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur harus menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan baik nasional maupun daerah. Hal itu dinilai penting karena infrastruktur merupakan pilar utama dalam pembangunan dan menjadi bagian penting dalam konektivitas antar wilayah.



Gambar 1.2
Panjang Jalan di Provinsi Kepulauan Riau Menurut Tingkat Kewangannya, 2010-2015

Sumber : Statistik Indonesia 2013 - 2016

Selama periode tahun 2013-2014 ada penambahan pembangunan jalan raya di Provinsi Kepulauan Riau. Pembangunan jalan raya tersebut meliputi penambahan panjang jalan yang menjadi wewenang negara, propinsi, maupun kabupaten/kota. Selain itu, kegiatan perbaikan dan perawatan jalan terus dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Aksesibilitas suatu wilayah merupakan faktor penting dalam menentukan seberapa cepatnya laju pembangunan di suatu daerah. Tanpa adanya jaminan aksesibilitas yang berkelanjutan, mustahil suatu daerah dapat berkembang. Hal ini dikarenakan suatu daerah membutuhkan pasokan dari daerah lain berupa sumber daya baik manusia maupun barang yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh daerah tersebut. Selain itu, jaminan aksesibilitas yang berkelanjutan merupakan komitmen pemerintah daerah kepada para investor untuk turut membangun suatu daerah.

Sebagai propinsi kepulauan yang 95 persen luas wilayahnya adalah lautan, Provinsi Kepulauan Riau sangat mengandalkan transportasi melalui udara dan laut untuk konektivitas antar daerah. Provinsi Kepulauan Riau dapat dijangkau dengan transportasi udara melalui Bandara Hang Nadim di Batam dan Bandara Raja Haji Fisabilillah di Tanjungpinang. Kedua bandara tersebut berperan sebagai pintu gerbang udara dari akses nasional maupun internasional untuk masuk ke Kepulauan Riau. Selain itu, ada juga bandara yang terletak di beberapa kabupaten/kota, seperti Bandara Sei Bati di Kabupaten Karimun, Bandara Ranai di Natuna, Bandara Dabo di Kabupaten Lingga, dan Bandara Matak di Kabupaten Kepulauan Anambas. Sementara itu, transportasi melalui laut dapat diakses melalui pelabuhan-pelabuhan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Aksesibilitas yang terjamin dan dipadukan dengan ketersediaan sumber daya energi akan semakin menumbuhkan rasa percaya investor dan wisatawan untuk datang ke Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah daerah berupaya untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin pesat dengan ketersediaan tenaga listrik. Terlebih lagi pembangunan di suatu wilayah membutuhkan sumber energi yang besar.

Pada tahun 2015, berdasarkan data yang diberikan oleh PLN Cabang Tanjungpinang bahwa daya terpasang di Kepulauan Riau sudah mencapai 230.744 KW dengan total pelanggan sebanyak 185.726 pelanggan yang terdiri dari rumah tangga, industri, sosial, bisnis, dan pemerintah. Data tersebut tidak termasuk sebagian besar wilayah Batam yang sejak tahun 2000 menjadi pelanggan PT. PLN Batam.

Tabel 1.4
*Jumlah Pelanggan dan
 Produksi Listrik PT.PLN
 di Provinsi Kepulauan Riau, 2015*

Taukah Anda ?

*Sebagian besar Listrik dari
 PT. PLN Batam diproduksi
 dari bahan bakar gas
 alam, yaitu 66,9 persen
 dari total produksi listrik*

Kabupaten/Kota	Jumlah Pelanggan	Produksi Listrik (Kwh)
(1)	(2)	(3)
Kabupaten		
1 Karimun	34.832	208.698.920
2 Bintan	35.922	49.157.703
3 Natuna	13.483	36.608.256
4 Lingga	18.979	34.045.255
5 Kepulauan Anambas	8.989	22.147.942
Kota		
1 Batam *	284.297	2.187.153.000
2 Tanjungpinang	68.733	356.167.074
Kepulauan Riau	465.235	2.893.978.150

Sumber : Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka, 2016
 * Annual Report PT.PLN Batam Tahun 2015

Selain aksesibilitas dan ketersediaan energi listrik, keberlangsungan sumber daya air di suatu daerah merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam menyiapkan daerah menjadi tujuan investasi.

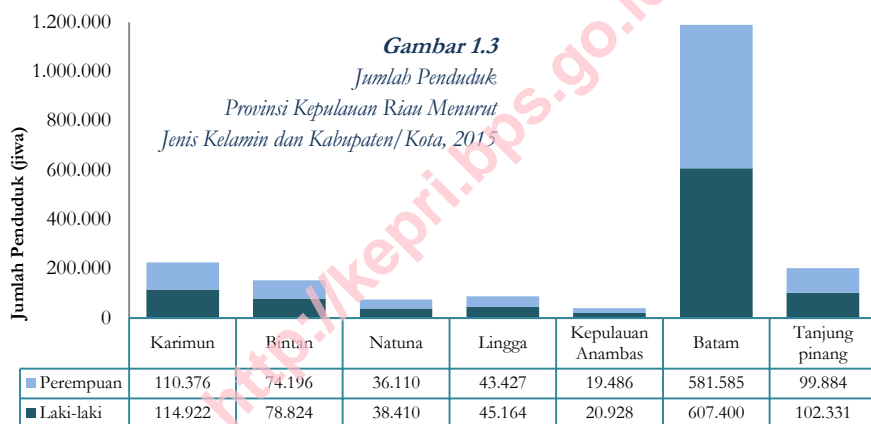
Tabel 1.5
*Jumlah Pelanggan dan
 Air Disalurkan
 Di Provinsi Kepulauan Riau,
 2015*

Kabupaten/Kota	Jumlah Pelanggan	Air Disalurkan (m3)
(1)	(2)	(3)
Kabupaten		
1 Karimun	4.401	970.064
2 Bintan	2.690	535.578
3 Natuna	3.798	2.305.082
4 Lingga	2.889	879.583
5 Kepulauan Anambas	190	12.833
Kota		
1 Batam *	232.765	70.304.106
2 Tanjungpinang	17.794	5.330.514
Kepulauan Riau	264.527	80.337.760

Sumber : BPS, Survei Perusahaan Air Bersih 2015

C. Kependudukan

Penduduk Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 sebanyak 1.973.403 jiwa, yang terdiri dari 1.007.979 jiwa penduduk laki-laki dan 965.064 jiwa penduduk perempuan. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, penduduk Provinsi Kepulauan Riau mengalami pertumbuhan sebesar 2,92 persen. Sementara itu, besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2015 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 104.



Sumber : Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka, 2016

Kepadatan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 adalah sekitar 241 jiwa/km². Lebih dari separuh jumlah penduduk Kepulauan Riau berada di Kota Batam yang hanya mempunyai luas daratan sebesar 960,25 km². Hal ini membuat kepadatan penduduk di Kota Batam cukup tinggi, yaitu 1.238 jiwa/km² atau nomor 2 tertinggi di Kepulauan Riau setelah Kota Tanjungpinang dengan kepadatan penduduk sebesar 1.399 jiwa/km². Sementara itu, kabupaten/kota yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kabupaten Natuna, yaitu hanya sebesar 37 jiwa/km².

Persebaran penduduk pada kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau secara umum cukup merata, walaupun 60,26 persen dari jumlah penduduk Kepulauan Riau berada di Kota Batam.

Hal ini dikarenakan Kota Batam merupakan kota industri yang tentunya memiliki daya tarik tersendiri, salah satunya adalah banyaknya lapangan pekerjaan bagi para penduduk untuk datang ke Kota Batam. Persentase terkecil dari persebaran penduduk di Provinsi Kepulauan Riau adalah di Kabupaten Kepulauan Anambas. Hanya 2,05 persen dari jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tabel 1.6
Persebaran, Kepadatan, dan
Laju Pertumbuhan Penduduk
Provinsi Kepulauan Riau
Menurut Kabupaten/ Kota, 2015

Taukah Anda ?

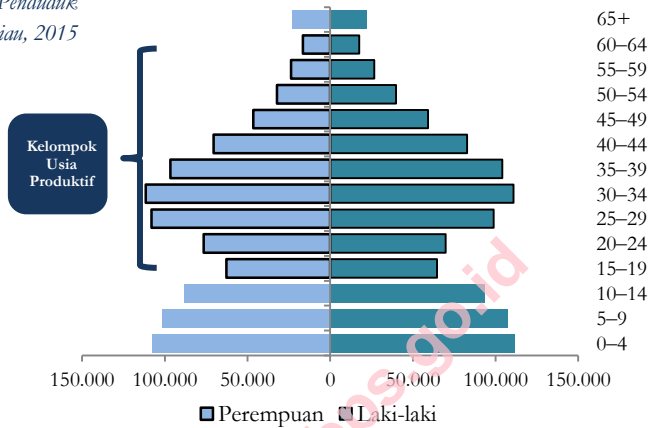
**Laju Pertumbuhan
Penduduk Kota Batam
adalah yang TERTINGGI
di Indonesia**

Kabupaten/Kota	Persebaran Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)	LPP (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1 Karimun	11,42	171	0,98
2 Bintan	7,76	168	1,26
3 Natuna	3,78	37	1,43
4 Lingga	4,49	39	0,77
5 Kepulauan Anambas	2,05	68	1,31
Kota			
1 Batam	60,26	1.238	4,13
2 Tanjungpinang	10,25	1.399	1,25
Kepulauan Riau	100	241	2,9

Sumber : Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka, 2016

Komposisi penduduk usia produktif yang besar sangat menguntungkan suatu wilayah karena dapat dijadikan peluang dalam menggenjot produktifitas masyarakatnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kelompok usia produktif adalah penduduk yang berada dalam rentang usia 15 sampai dengan 64 tahun. Penduduk usia produktif yang berkualitas tinggi dapat menghasilkan barang dan jasa secara optimal sebagai *booster* perekonomian wilayah. Provinsi Kepulauan Riau yang diharapkan mampu menjadi penyangga perekonomian nasional memiliki komposisi penduduk yang cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari cukup besarnya persentase penduduk usia produktif Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015, yaitu 66,9 persen dari total seluruh penduduk atau sebanyak 1.319.258 jiwa penduduk usia produktif.

Gambar 1.4
Piramida Penduduk
Provinsi Kepulauan Riau, 2015



Sumber : Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka, 2016

Kondisi saat jumlah penduduk usia produktif suatu wilayah lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia non produktif disebut **bonus demografi**. Sejak tahun 2009 Provinsi Kepulauan Riau sedang mengalami **bonus demografi**. Keadaan itu ditandai dengan proporsi penduduk usia produktif sekitar 69 persen dengan angka ketergantungan (*dependency ratio*) sebesar 49,61 persen, yang artinya dari 100 orang penduduk usia produktif menanggung 49 atau 50 orang penduduk usia tidak produktif.

Bonus demografi di Kepulauan Riau diperkirakan akan terus terjadi sampai dengan tahun 2035. Pemahaman terhadap bonus demografi berguna bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan dan merumuskan kebijakan terbaik untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat suatu daerah.

Oleh karena itu, bonus demografi dapat menjadi peluang sekaligus ancaman saat pemerintah tidak dapat memanfaatkan kondisi tersebut. Peluang akan tercipta saat pemerintah menyiapkan generasi muda yang berkualitas dari sisi kesehatan, pendidikan, mental, *skill*, dan etika. Selain itu, penyiapan dari sisi penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi penduduk usia produktif akan membuat *The Window of Opportunity* semakin terbuka lebar.

D. Ketenagakerjaan

Informasi ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting untuk memetakan potensi suatu wilayah. BPS mengumpulkan data ketenagakerjaan melalui sensus dan survei antara lain : Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Sosial Nasional (SUSENAS), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Dari seluruh sensus/survei tersebut hanya SAKERNAS yang dirancang khusus untuk menyajikan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan.

Berdasarkan hasil Sakernas bulan Agustus 2015, jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Kepulauan Riau adalah 1.370.989 orang yang terdiri dari 699.784 laki-laki dan 671.105 perempuan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014. Pada tahun 2014 TPAK sebesar 65,95 persen turun menjadi 65,07 persen pada tahun 2015 atau hanya sebanyak 891.988 penduduk yang termasuk angkatan kerja.

Tabel 1.7
Jumlah Penduduk Bekerja dan Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota, 2015

Taukah Anda ?

62,6 persen dari total penduduk yang bekerja di Kepulauan Riau, berada di Kota Batam

Kabupaten/Kota	Angkatan Kerja (orang)	
	Bekerja (orang)	Pengangguran Terbuka (orang)
(1)	(2)	(3)
Kabupaten		
1 Karimun	86.673	5.229
2 Bintan	61.843	4.572
3 Natuna	28.815	3.397
4 Lingga	37.652	1.574
5 Kepulauan Anambas	17.366	1.184
Kota		
1 Batam	524.046	33.992
2 Tanjungpinang	80.275	5.370
Kepulauan Riau	836.670	55.318

Sumber : Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka, 2016

Tabel 1.8
*Jumlah Penduduk Bekerja
 Menurut Lapangan
 Pekerjaan Utama
 Provinsi Kepulauan Riau, 2015*

	Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah Penduduk Bekerja	%
	(1)	(2)	(3)
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	92.243	11,03
2	Pertambangan dan Penggalian	13.992	1,67
3	Industri Pengolahan	207.230	24,77
4	Listrik, Gas, dan Air	2.775	0,33
5	Konstruksi	68.849	8,23
6	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	199.300	23,82
7	Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	54.890	6,56
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan	30.103	3,60
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	167.288	19,99
	Jumlah	836.670	100

Sumber : Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka, 2016

Taukah Anda ?

*Hanya 15 persen dari
 penduduk bekerja di
 Kepulauan Riau yang
 memiliki pendidikan di
 atas SLTA*

Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, Kepulauan Riau adalah salah satu propinsi maritim dengan 95 persen luas wilayahnya adalah lautan. Namun, sektor kelautan dan perikanan masih belum berhasil menarik perhatian penduduk, terutama penduduk yang masih berstatus pengangguran.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa hanya sekitar 11 persen penduduk yang bekerja di sektor Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan. Jika ditinjau secara rinci, ternyata hanya 5,8 persen yang bekerja di subsektor perikanan.

BAB II

ULASAN SINGKAT

Perikanan Kepulauan Riau

Produksi Perikan Kepulauan Riau 2010-2014



Hasil ST2013

Rumah Tangga Usaha Perikanan Tangkap



29.335
Ruta

Rumah Tangga Usaha Perikanan Budidaya



6.520
Ruta

Ekspor Perikan Kepulauan Riau 2010-2015



BAB 2

ULASAN SINGKAT

"Provinsi Kepulauan Riau akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi bagi Republik Indonesia dimasa depan"



A. Struktur Ekonomi

Salah satu cara untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah adalah dengan cara melihat struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara umum, pendekatan penghitungan PDRB dibagi menjadi 2 (dua), yaitu menurut produksi dan menurut penggunaan. Melalui PDRB produksi dapat dilihat kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan *output* (nilai tambah) oleh kategori atas berbagai aktifitas produksinya. Sedangkan PDRB menurut penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari *output* (nilai tambah) tersebut. PDRB menurut produksi yang semula disajikan dalam 9 (sembilan) kategori berkembang menjadi 17 (tujuh belas) kategori sejalan dengan pergantian tahun dasar penghitungan PDRB dari tahun dasar 2000 (2000=100) menjadi tahun dasar 2010 (2010=100).

Melalui pendekatan PDRB dapat dilihat kekuatan ekonomi suatu wilayah berdasarkan nilai tambah bruto (NTB) yang dihasilkan. Kategori dengan NTB terbesar akan menjadi tulang punggung perekonomian suatu wilayah dan semakin besar pula ketergantungan suatu daerah terhadap kategori tersebut.

Pada tahun 2015, PDRB Provinsi Kepulauan Riau adalah Rp 203.281.401.840.000.000 (dua ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh satu trilyun empat ratus satu milyar delapan ratus empat puluh juta Rupiah). Nilai tersebut termasuk penghitungan nilai tambah dari minyak dan gas (migas).

Selama tahun 2010-2015 PDRB Provinsi Kepulauan Riau terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 12,8 persen per tahun.

Tabel 2.1

*PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2010 dan 2015*

**Tahun 2015 adalah data sangat sementara*

Kategori	Uraian	PDRB (Juta Rupiah)		Share Tahun 2015
		2010	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.506.560,84	7.261.284,39	3,57
B	Pertambangan dan Penggalian	19.854.861,33	29.018.106,59	14,27
C	Industri Pengolahan	42.191.387,32	78.524.658,51	38,63
D	Pengadaan Listrik dan Gas	953.340,67	2.220.976,37	1,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	155.607,97	233.263,72	0,11
F	Konstruksi	17.930.710,70	36.456.418,99	17,93
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.917.720,65	16.320.849,41	8,03
H	Transportasi dan Pergudangan	2.953.542,32	6.546.184,80	3,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.092.637,65	4.398.807,90	2,16
J	Informasi dan Komunikasi	2.297.390,19	3.795.904,73	1,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.886.952,66	5.280.985,70	2,60
L	Real Estate	1.773.637,86	3.016.612,60	1,48
M,N	Jasa Perusahaan	5.672,26	9.149,72	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.486.177,30	4.972.159,62	2,45
P	Jasa Pendidikan	1.551.224,64	2.569.031,05	1,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.064.838,60	1.737.396,42	0,85
R,S,T,U	Jasa lainnya	581.408,64	919.611,32	0,45
PDRB Dengan Migas		111.223.671,60	203.281.401,84	
PDRB Tanpa Migas		92.773.824,24	176.194.255,78	

Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kepulauan Riau 2011-2015

Berdasarkan data PDRB 2010-2015, struktur ekonomi Provinsi Kepulauan Riau masih disangga oleh tiga kategori utama, yaitu kategori Industri Pengolahan, kategori Konstruksi, dan kategori Pertambangan dan Penggalian. Total kontribusi dari ketiga kategori ini mencapai sekitar 70 persen dari total PDRB. Kategori yang memiliki andil tertinggi adalah kategori Industri Pengolahan, yaitu sekitar 38 persen terhadap total PDRB Kepulauan Riau.

Tabel 2.2
Peran Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau (%), Tahun 2010 - 2015
**Tahun 2014 adalah data sementara; **Tahun 2015 adalah data sangat sementara*

Kategori/Subkategori/Golongan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,05	3,84	3,64	3,56	3,55	3,57
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	35,87	36,36	35,19	33,93	33,86	33,26
a. Tanaman Pangan	1,10	1,18	1,30	1,28	1,32	1,39
b. Tanaman Hortikultura	10,70	11,04	10,89	10,97	11,51	12,05
c. Tanaman Perkebunan	60,77	61,48	60,04	59,18	58,73	58,07
d. Peternakan	25,03	24,00	25,43	26,29	26,22	26,35
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	2,40	2,30	2,33	2,28	2,21	2,13
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,80	0,87	0,83	0,78	0,72	0,67
3 Perikanan	63,33	62,77	63,98	65,28	65,41	66,07

Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kepulauan Riau 2011-2015

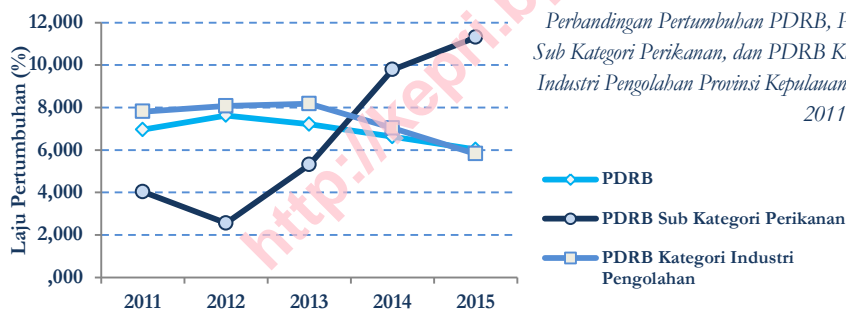
Jika dilihat dari peranan masing-masing kategori secara detil, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan hanya memiliki andil 3,57 persen terhadap total PDRB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015. Bahkan jika dilihat dari tahun 2010, peranan kategori yang diharapkan dapat menjadi kategori penyangga dalam struktur ekonomi Kepulauan Riau di masa yang akan datang tersebut, justru mengalami *trend* yang cenderung menurun walaupun mulai naik kembali pada tahun 2015.

Akan tetapi, jika dilihat hingga level yang lebih kecil, subkategori Perikanan mengalami *trend* yang terus meningkat terhadap kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dari tahun 2010-2015. Pada tahun 2015, secara khusus subkategori Perikanan memiliki peranan 66,07 persen terhadap nilai PDRB pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Pertumbuhan PDRB subkategori Perikanan sangat pesat. Hal ini terlihat pada rentang tahun 2013-2015. Pada rentang tahun tersebut *trend* pertumbuhan PDRB kategori Industri Pengolahan mulai mengalami penurunan laju pertumbuhan. Sedangkan PDRB subkategori Perikanan justru berkembang cukup pesat yang terlihat melalui laju pertumbuhan yang melesat mulai tahun 2012-2015.

Gambar 2.1

Perbandingan Pertumbuhan PDRB, PDRB Sub Kategori Perikanan, dan PDRB Kategori Industri Pengolahan Provinsi Kepulauan Riau, 2011-2015



Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kepulauan Riau 2011-2015

Kepulauan Riau memiliki potensi yang sangat besar dalam menjadikan kelautan dan perikanan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat tercermin pada luas laut yang mencapai 417 ribu km² dan memiliki ribuan pulau dengan berbagai keunggulannya. Pemanfaatan laut dan berbagai isinya tidak hanya dapat diandalkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Akan tetapi, melalui strategi yang tepat sektor kelautan dan perikanan dapat dijadikan solusi untuk sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat, sehingga dapat menekan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antar daerah.

B. Rumah Tangga Perikanan

Pemanfaatan berbagai potensi kelautan dan perikanan tidak lepas dari peran rumah tangga perikanan sebagai aktor utama dalam kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan. Rumah tangga perikanan diharapkan mampu menjadi motor penggerak untuk meningkatkan produksi barang/jasa sektor kelautan dan perikanan.

Rumah tangga usaha perikanan adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur, yang melakukan kegiatan perikanan baik budi daya ikan maupun penangkapan ikan. yang dilakukan oleh anggota rumah tangga sebagai kegiatan usaha yaitu kegiatan perikanan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar atas risiko usaha (BPS, Sensus Pertanian 2013).

Rumah tangga usaha pertanian dapat mengusahakan lebih dari 1 subsektor usaha pertanian, sehingga jumlah rumah tangga usaha pertanian bukan merupakan penjumlahan rumah tangga usaha pertanian dari masing-masing subsektor.

Tabel 2.3
*Jumlah Rumah Tangga
Usaha Perikanan
Menurut Kabupaten /Kota
di Provinsi Kepulauan Riau,
2013*

Kabupaten/Kota	Rumah Tangga Usaha Perikanan	
	Penangkapan	Budidaya
(1)	(2)	(3)
Kabupaten		
1 Karimun	4.173	536
2 Bintan	4.005	649
3 Natuna	2.393	594
4 Lingga	7.569	1.342
5 Kepulauan Anambas	2.470	1.394
Kota		
1 Batam	7.608	1.713
2 Tanjungpinang	1.117	292
Kepulauan Riau	29.335	6.520

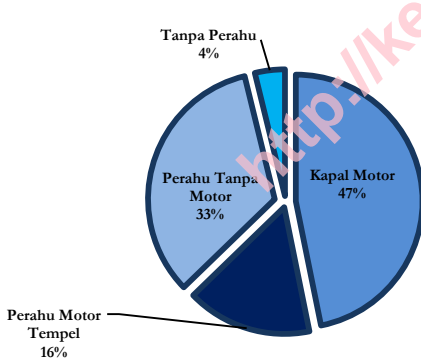
Sumber : BPS, Sensus Pertanian 2013

Taukah Anda ?

**Jumlah Rumah Tangga
Usaha Penangkapan
Ikan Kepulauan Riau
terbanyak ke 8 di
Indonesia**

Berdasarkan hasil Sensus Pertanian tahun 2013 (ST2013) diketahui ada sebanyak 32.155 rumah tangga usaha perikanan dari total seluruh rumah tangga usaha pertanian Provinsi Kepulauan Riau, yaitu sebanyak 69.991 rumah tangga. Jumlah tersebut masih relatif kecil jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, Maluku, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.

Jumlah rumah tangga usaha perikanan di Kepulauan Riau secara geografis belum sebanding dengan luasnya wilayah lautan yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau. Jika dibandingkan dengan data hasil ST2003, terjadi penurunan jumlah rumah tangga usaha perikanan di Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2003 tercatat ada 34.055 rumah tangga usaha perikanan di Provinsi Kepulauan Riau. Jumlah ini terus menurun selama 10 tahun berikutnya, hingga pada tahun 2013 berkurang menjadi 32.155 rumah tangga usaha perikanan.



Gambar 2.2
Persentase Rumah Tangga Perikanan Berdasarkan Jenis Kapal/Perahu Utama yang Digunakan di Laut Provinsi Kepulauan Riau, 2013

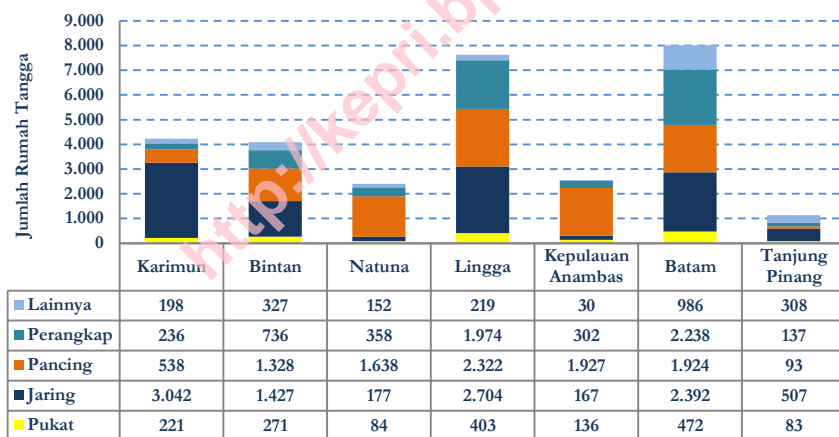
Sumber : BPS, Sensus Pertanian 2013

Berdasarkan hasil ST2013 Provinsi Kepulauan Riau, masih ada 33 persen rumah tangga usaha perikanan tangkap yang menggunakan perahu tanpa motor dalam kegiatan penangkapan ikan di laut. Bahkan masih ada 4 persen rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut tanpa menggunakan perahu.

Dari sisi alat tangkap yang digunakan, sebagian besar rumah tangga usaha perikanan tangkap di kabupaten/kota se-Kepulauan Riau sudah menggunakan jaring.

Hal ini terlihat melalui persentase penggunaan jaring sebagai alat tangkap ikan di laut oleh rumah tangga perikanan lebih besar dibandingkan persentase alat tangkap lainnya, seperti pancing dan perangkap. Akan tetapi, terdapat 2 kabupaten yang masih 'setia' dalam menggunakan pancing sebagai alat tangkap ikan. Sebanyak 68 persen rumah tangga usaha perikanan di Kabupaten Natuna dan 75 persen rumah tangga usaha perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas masih menggunakan pancing sebagai alat tangkap utama dalam kegiatan penangkapan ikan di laut.

Gambar 2.3
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Berdasarkan Jenis Alat Tangkap Utama yang Digunakan di Laut Provinsi Kepulauan Riau, 2013

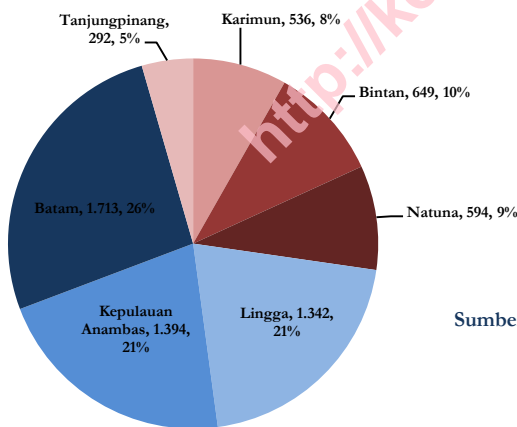


Sumber : BPS, Sensus Pertanian 2013

Data mengenai jenis kapal dan alat tangkap yang digunakan oleh rumah tangga usaha perikanan dapat dijadikan acuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dinilai penting karena salah satu cara untuk menggali potensi ikan yang ada di laut adalah dengan mengandalkan jenis kapal dan alat tangkap yang mutakhir.

Selain perikanan tangkap, kegiatan lain dalam subsektor perikanan adalah budidaya perikanan. Definisi usaha budidaya ikan yang digunakan dalam ST2013 adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan (pembenihan) ikan dengan menggunakan lahan atau perairan dan fasilitas buatan serta memanen hasilnya dengan tujuan sebagian atau seluruhnya untuk dijual/ditukar atas risiko usaha.

Berdasarkan hasil ST2013, terdapat 6.520 rumah tangga usaha perikanan budidaya di Kepulauan Riau. Sebagian besar tinggal di Kota Batam, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Lingga dengan total persentase di atas 60 persen. Kota Batam merupakan daerah yang memiliki jumlah rumah tangga usaha budidaya ikan terbanyak (1.713 rumah tangga), diikuti oleh Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna yang tercatat masing-masing memiliki sebanyak 1.394 dan 1.342 rumah tangga usaha budidaya ikan.



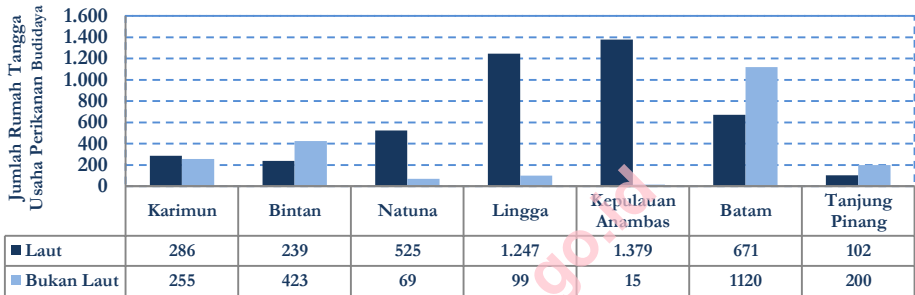
Gambar 2.4
*Persentase Persebaran
 Rumah Tangga Usaha Perikanan Budidaya
 Menurut Kabupaten/Kota
 Di Provinsi Kepulauan Riau, 2013*

Sumber : BPS, Sensus Pertanian 2013

Lokasi budidaya ikan yang tercatat melalui ST2013 meliputi budidaya ikan di laut, di tambak/air payau, di kolam/air tawar, di sawah, dan di perairan umum. Untuk melihat secara khusus pemanfaatan laut sebagai lokasi budidaya, kategori lokasi usaha budidaya ikan dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu laut dan bukan laut.

Gambar 2.5

Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Usaha Perikanan Budidaya Menurut Lokasi Budidaya dan Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau, 2013



Sumber : BPS, Sensus Pertanian 2013

Berdasarkan grafik di atas, dapat terlihat bahwa kabupaten/kota yang memiliki luas lautan yang besar (Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas) akan cenderung memiliki rumah tangga usaha perikanan budidaya yang berlokasi di laut, dibandingkan dengan bukan laut seperti kolam, tambak, dan sejenisnya. Rendahnya permintaan akan ikan air tawar juga membuat rendahnya minat masyarakat di ketiga kabupaten ini untuk menjalankan usaha budidaya ikan di air tawar, tambak, dan kolam.

Hal ini berbeda dengan Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Bintan yang memiliki lebih banyak rumah tangga usaha perikanan budidaya yang berlokasi di bukan laut dibandingkan dengan yang berlokasi di laut. Sedangkan di Kabupaten Karimun memiliki proporsi yang hampir sama antara rumah tangga usaha perikanan budidaya di laut dan bukan laut.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sentra rumah tangga budidaya ikan laut ada di Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Sedangkan sentra rumah tangga budidaya ikan air tawar ada di Kabupaten Bintan, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang.

C. Produksi Perikanan

Potensi perikanan yang besar di Provinsi Kepulauan Riau dapat memberikan manfaat yang optimal secara berkelanjutan bagi daerah dan masyarakat bila dikelola dengan baik dan bertanggungjawab. Pemerintah telah menetapkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : Per.01/MEN/2009. Penetapan WPP-RI perlu dilakukan untuk menjamin pemanfaatan yang optimal dan berkelanjutan terhadap sumber daya ikan. WPP-RI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Tabel 2.4

Kode dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI)

Kode (1)	Wilayah Perairan (2)
WPP-RI 571	Selat Malaka dan Laut Andaman
WPP-RI 572	Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda
WPP-RI 573	Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat
WPP-RI 711	Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan
WPP-RI 712	Laut Jawa
WPP-RI 713	Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali
WPP-RI 714	Teluk Tolo dan Laut Banda
WPP-RI 715	Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau
WPP-RI 716	Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera
WPP-RI 717	Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik
WPP-RI 718	Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur

Sumber : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : Per.01/MEN/2009

Salah satu WPP-RI yang telah ditetapkan adalah WPP-RI 711 yang meliputi Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan. Dengan adanya penetapan wilayah pengelolaan perikanan, kebijakan pengelolaan perikanan menjadi lebih tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan produksi perikanan dengan tetap menjaga keberlanjutan stok sumber daya ikan (*ecological sustainability*)

Gambar 2.6
Perbandingan Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Indonesia dan WPP-RI 711 Tahun 2005-2014

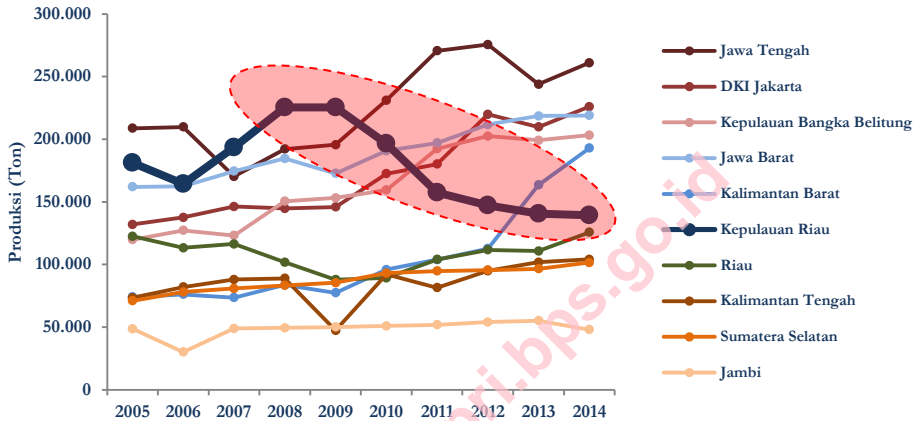


Sumber : Direktorat Jendral Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

Gambar 2.7

Perbandingan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Provinsi-provinsi WPP-RI 711

Tahun 2005-2014



Sumber : Badan Pusat Statistik

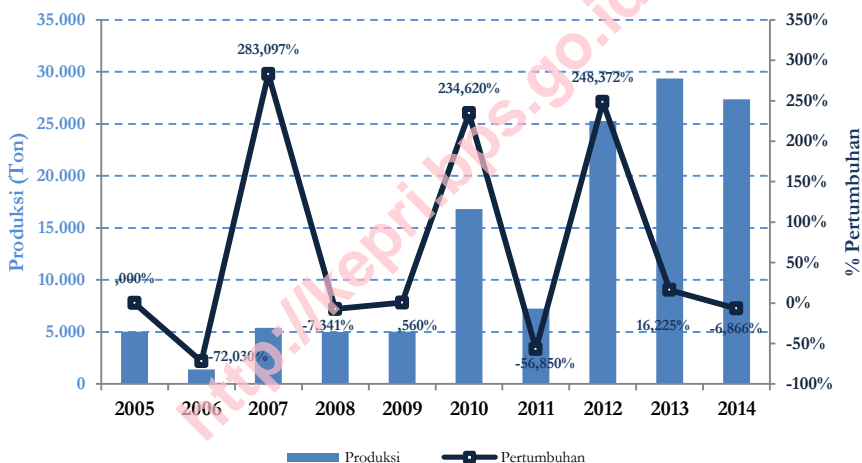
Trend produksi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau selama 10 tahun terakhir (2005-2014) mengalami penurunan sebesar 23 persen, yaitu 181.118 ton pada tahun 2005 menjadi 139.331 ton pada tahun 2014. Sebagai provinsi yang tergolong memiliki potensi perikanan terbesar di wilayah WPP-RI 711, produksi perikanan tangkap Provinsi Kepulauan Riau cukup rendah dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah WPP-RI 711 seperti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kalimantan Barat.

Provinsi Kepulauan Riau sebenarnya memiliki potensi perikanan tangkap yang sangat besar di Laut Natuna yang selama ini masih belum dioptimalkan. *Fishing Ground Area* Kabupaten Natuna mencakup 75,5 persen luas WPP-RI 711. Potensi lestari perikanan tangkap di perairan Natuna mencapai lebih dari 500.000 ton per tahun. Jika diasumsikan *Maximum Sustainable Yield* (MSY) adalah maksimum 80 persen dari total potensi lestari ikan, maka diperkirakan produksi perikanan tangkap di perairan Natuna dapat mencapai 400.000 ton per tahun.

Selain perikanan tangkap, Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi untuk terus mengembangkan perikanan budidaya. Menurut data BPS, total produksi perikanan budidaya Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014 sebesar 27.366 ton. Jumlah tersebut turun sebesar 6,8 persen dari tahun 2013 yang mencapai 29.383 ton.

Gambar 2.8

Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2014



Sumber : Badan Pusat Statistik

Tinggi atau rendahnya hasil produksi perikanan budidaya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kualitas lahan (areal) yang digunakan, manajemen pakan, manajemen penyakit dan obat, pemakaian bibit unggul, dan sebagainya. Selain itu, salah satu faktor yang juga menentukan jumlah produksi perikanan budidaya adalah luas baku budidaya ikan.

Secara umum, semakin besar luas baku (areal) yang digunakan untuk melakukan usaha budidaya ikan maka produksi ikan hasil budidaya juga akan semakin banyak.

Berdasarkan data ST2013, rata-rata luas baku budidaya ikan terbesar adalah untuk jenis budidaya bukan ikan hias di tambak/air payau, yaitu sebesar 9,12 ribu m²/rumah tangga, sedangkan rata-rata luas baku paling kecil adalah untuk budidaya bukan ikan hias di laut, dengan rata-rata luas baku sebesar 127,01 m²/rumah tangga. Sedangkan untuk rata-rata luas baku budidaya ikan hias yaitu sebesar 119,08 m²/rumah tangga.

Tabel 2.5
Rata-Rata Luas Baku Budidaya Ikan
Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Budidaya Ikan (m²/rumah tangga)
Tahun 2013

Kabupaten/Kota	Bukan Ikan Hias (Lokasi)					Ikan Hias
	Laut	Tambak/ Air Payau	Kolam Air Tawar	Sawah	Perairan Umum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten						
1 Karimun	939,09	1.257,58	412,65	-	160,00	187,00
2 Bintan	535,50	5.675,09	1.009,97	-	292,00	194,83
3 Natuna	74,74	5.040,00	625,22	-	-	-
4 Lingga	19,01	8.366,18	176,95	-	-	91,67
5 Kepulauan Anambas	29,96	-	58,80	-	-	-
Kota						
1 Batam	62,29	1.948,08	786,74	-	765,63	128,95
2 Tanjungpinang	220,25	68.273,14	1.715,64	-	-	18,27
Kepulauan Riau	127,01	9.120,20	839,71	-	728,90	119,08

Sumber : BPS, Sensus Pertanian 2013

Pemanfaatan potensi perikanan Provinsi Kepulauan Riau, baik tangkap maupun budidaya masih relatif rendah jika dibandingkan dengan daerah lain yang bahkan memiliki luas wilayah lautan lebih kecil dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau.

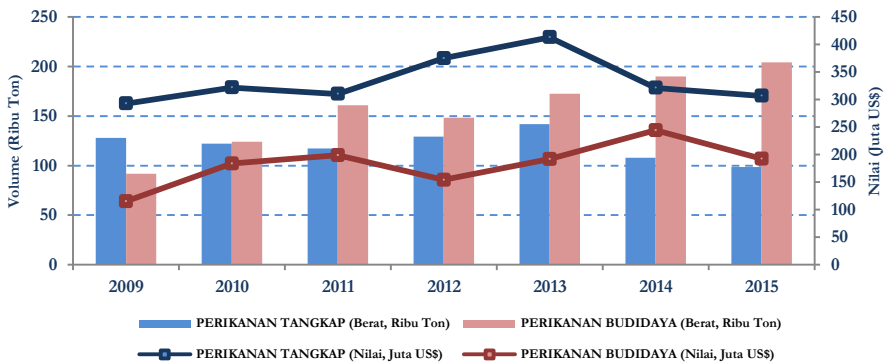
Potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Provinsi Kepulauan Riau harus dikelola secara baik dan bertanggungjawab dengan mengedepankan asas keberlanjutan (*sustainability*), sehingga dapat menjadi modal utama pembangunan di masa kini dan masa yang akan datang.

D. Ekspor Perikanan

Salah satu kegiatan yang berperan penting dalam perekonomian suatu daerah atau negara adalah kegiatan perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan untuk memperdagangkan berbagai *output* berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara untuk dapat dijual ke luar negeri serta mendatangkan barang dan jasa dari luar negeri untuk kemudian didatangkan ke negara tersebut dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kegiatan untuk menjual barang ke luar negeri dinamakan kegiatan ekspor, sedangkan kegiatan untuk mendatangkan barang dari luar negeri dinamakan kegiatan impor. Untuk menjaga neraca perdagangan tetap surplus, maka suatu wilayah harus tetap mendorong berbagai komoditi andalannya untuk dapat menembus pasar internasional.

Selain ekspor minyak bumi dan gas (migas), produk perikanan merupakan salah satu komoditi ekspor non migas yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar untuk membuat surplus neraca perdagangan Indonesia.

Gambar 2.9
Volume dan Nilai Ekspor Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Indonesia Tahun 2009-2015



Sumber : BPS, Analisis Komoditi Ekspor 2009-2015

Pada tahun 2015, total nilai ekspor Provinsi Kepulauan Riau mencapai 11.948,98 juta US\$. Nilai tersebut merupakan yang terendah selama 4 (empat) tahun terakhir. Provinsi Kepulauan Riau memiliki 22 pelabuhan muat ekspor yang tersebar di setiap kabupaten/kota. Jika ditinjau dari kabupaten/kota muat ekspor barang, terlihat bahwa ekspor Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 yang terbesar berasal dari Kota Batam, yaitu sebesar 9.166,84 juta US\$ atau 76,72 persen.

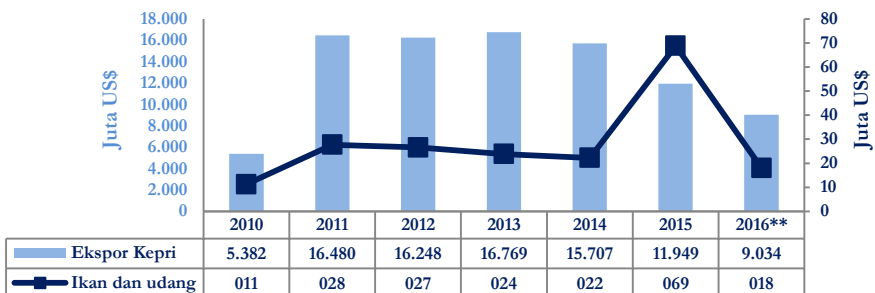
Negara yang menjadi tujuan utama ekspor Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 adalah Singapura, yaitu 6.394.410.282 US\$ atau sebesar 53,51 persen. Negara berikutnya yang menjadi pangsa pasar ekspor Provinsi Kepulauan Riau adalah Australia, Malaysia, Amerika Serikat, India, Tiongkok, Jepang, Perancis, Belanda, dan negara-negara di Asia dan Eropa lainnya.

Sebagai daerah yang memiliki potensi perikanan yang besar, perikanan Kepulauan Riau seharusnya bisa menjadi komoditas andalan ekspor di masa kini dan masa yang akan datang. Akan tetapi, ekspor ikan dan udang Provinsi Kepulauan Riau yang tertinggi selama 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2015 dan hanya sebesar 0,58 persen atau 68,84 juta US\$.

Gambar 2.10

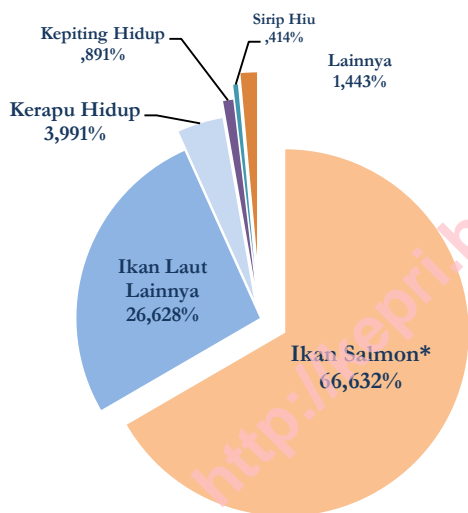
*Nilai Total Ekspor (FOB) Kepulauan Riau dan Nilai Ekspor (FOB) Komoditas Ikan dan Udang Kepulauan Riau Tahun 2010-2016***

***Januari-Oktober*



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Statistik Ekspor Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015

Komoditi hasil perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang paling banyak diekspor pada tahun 2015 adalah ikan, terutama ikan salmon yang mencapai nilai 45,87 juta US\$ atau sebesar 66,63 persen dari total nilai ekspor ikan dan udang. Selain itu komoditas ikan laut lainnya, kerapu hidup, dan kepiting hidup juga menjadi komoditas ekspor yang dominan di Provinsi Kepulauan Riau.



Gambar 2.11
Komoditas Utama Ekspor Hasil Perikanan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau,
Statistik Ekspor Provinsi
Kepulauan Riau 2010-2015

*Kode HS 0302190000 :

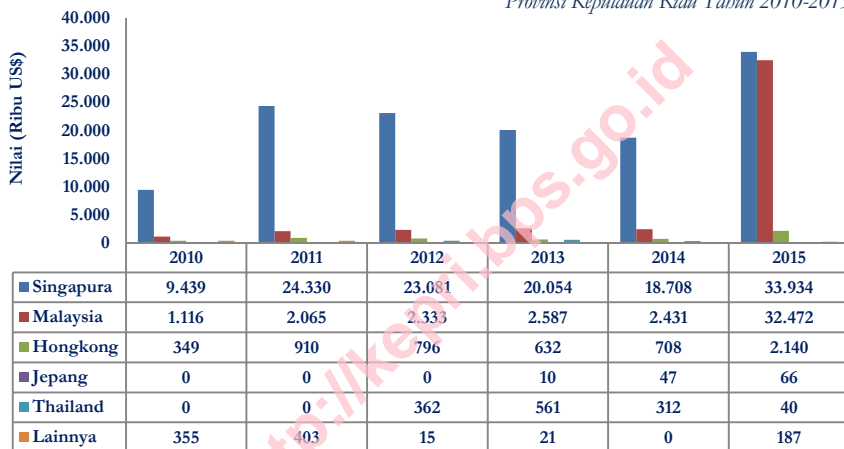
Other salmonidae fish, excluding fillet, liver and roes, fresh

Komoditas utama ekspor hasil perikanan Provinsi Kepulauan Riau sangat bervariasi setiap tahunnya dan bergantung kepada ragam permintaan pasar internasional. Provinsi Kepulauan Riau harus meningkatkan penerapan sistem jaminan mutu yang sejalan (harmonis) dengan sistem jaminan mutu negara tujuan ekspor, terutama untuk komoditas perikanan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kasus penolakan ekspor oleh negara-negara tujuan, terutama negara-negara Uni Eropa yang memiliki *Rapid Alert System for Food and Feed* (RASFF) untuk menjaga kualitas dan keamanan komoditi ekspor yang masuk ke dalam negara tersebut.

Berdasarkan negara tujuan ekspor, Singapura menduduki tepat teratas sebagai negara tujuan utama ekspor hasil perikanan Kepulauan Riau, yaitu sebesar 33,9 juta US\$ atau sebesar 49,3 persen.

Gambar 2.12

*Negara Tujuan Utama Ekspor Hasil Perikanan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015*



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Statistik Ekspor Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015

Aspek mutu merupakan faktor yang sangat menentukan dalam perdagangan hasil perikanan di pasar internasional. Konsumen hasil perikanan yang merupakan negara-negara maju memiliki standar dan kepekaan yang tinggi terhadap mutu hasil perikanan yang diperdagangkan di pasar internasional.

Sebagai daerah yang memiliki potensi ekspor hasil perikanan yang cukup besar, pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan melakukan kajian tentang penyebab masih rendahnya nilai ekspor hasil perikanan. Selain itu pemerintah dapat membangun sistem serta unit pendukung yang dibutuhkan untuk menggenjot produksi perikanan yang berkualitas sehingga ekspor hasil perikanan dapat meningkat setiap tahun.

E. Kawasan Konservasi Perairan

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kawasan yang memiliki ekosistem lengkap sebagai habitat bagi ikan dan organisme lainnya untuk mencari makan (*feeding ground*), bertelur (*nesting ground*), dan berpijah (*spawning ground*). Kawasan tersebut harus dilestarikan untuk menjaga keberlanjutan potensi sumber daya ikan dan aneka ragam hayati laut lainnya.

Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/MEN/2010). Pada tahun 2015, Indonesia telah memiliki 154 kawasan konservasi perairan dengan luas total mencapai 17.302.801,16 Ha yang tersebar di seluruh Indonesia, baik yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, maupun Pemerintah Daerah. Kawasan konservasi perairan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat disebut Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) dan kawasan konservasi yang menjadi kewenangan daerah disebut Konservasi Perairan Daerah (KKPD).

Tujuan ditetapkannya kawasan konservasi adalah untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan dengan system zonasi. Berdasarkan kategorinya, kawasan konservasi perairan dapat dibagi menjadi:

- Kawasan Konservasi Taman Nasional Laut (TNL);
- Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Laut (T WAL);
- Kawasan Konservasi Suaka Marga Satwa Laut (SML);
- Kawasan Konservasi Cagar Alam Laut (CAL);
- Kawasan Konservasi Taman Nasional Perairan (TNP);
- Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan (SAP);
- Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan (TWP);
- Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD); dan
- Kawasan Konservasi Suaka Perikanan (SP).

Provinsi Kepulauan Riau yang termasuk ke dalam WPP-RI 711 memiliki 6 kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 2.6
Kawasan Konservasi Perairan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang Dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015

Nama Kawasan	Kabupaten/ Kota	Tahun Penetapan	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
Wilayah Pengelolaan Terumbu Karang Senayang Lingga	Lingga	2002	-
Kawasan Konservasi Laut Daerah Bintan	Bintan	2007	472905,00
<i>Marine Management Area Coremap Batam</i>	Batam	2007	66867,00
Kawasan Konservasi Laut Natuna	Natuna	2008	142997,00
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Natuna	Natuna	2011	9226,97
Kawasan Konservasi Laut Daerah Lingga	Lingga	2015	385467,50

Sumber : Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

Selain kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki kawasan konservasi perairan nasional. Kawasan tersebut adalah Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya yang memiliki luas 1.262.686 Ha.

TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya dikelola dengan sistem zonasi. Kawasan ini telah dibagi menjadi 4 (empat) zona, yaitu zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, dan zona lainnya.

Zona inti merupakan area yang dilindungi secara penuh. Kegiatan yang dapat dilakukan di zona ini benar-benar dibatasi. **Zona perikanan berkelanjutan** merupakan area terluas yang ditujukan bagi masyarakat/nelayan untuk melakukan aktivitas perikanan yang ramah lingkungan dan skala kecil/tradisional dan dapat dimanfaatkan juga untuk kegiatan wisata memancing. **Zona pemanfaatan** dialokasikan bagi kegiatan wisata terbatas atau wisata minat khusus dan tidak berorientasi pada *mass tourism*. Zona ini juga merupakan *no take zone* atau zona larang ambil. **Zona lainnya** merupakan zona yang dialokasikan bagi perlindungan dan rehabilitasi kawasan. (Kompas - Kepulauan Anambas, Surga Bawah Laut di Garda Terdepan).

Dengan adanya zonasi melalui kawasan konservasi, diharapkan dapat melestarikan ekosistem yang paling penting untuk menjaga potensi ikan suatu wilayah, yaitu terumbu karang dan mangrove.

Tabel 2.7

Luas Terumbu Karang dan Luas Mangrove Wilayah Indonesia

Tabun 2015

Provinsi	Luas Terumbu Karang (Ha)	Luas Mangrove (Ha)
(1)	(2)	(3)
Sumatera	478.678,62	630.395,54
Aceh	48.225,12	25.295,72
Sumatera Utara	74.464,33	55.640,50
Sumatera Barat	42.193,66	18.784,06
Riau		221.452,16
Jambi		14.735,30
Sumatera Selatan		157.494,31
Bengkulu	2.816,68	1.942,98
Lampung	2.520,41	10.895,60
Kepulauan Bangka Belitung	29.643,01	66.484,26
Kepulauan Riau	278.815,41	57.670,65
Jawa	67.777,56	132.093,33
Bali - Nusa Tenggara	339.740,02	34.667,46
Kalimantan	117.877,17	638.391,51
Sulawesi	805.272,97	149.703,16
Maluku - Papua	708.511,58	2.031.194,20
INDONESIA	2.517.857,90	3.616.445,19

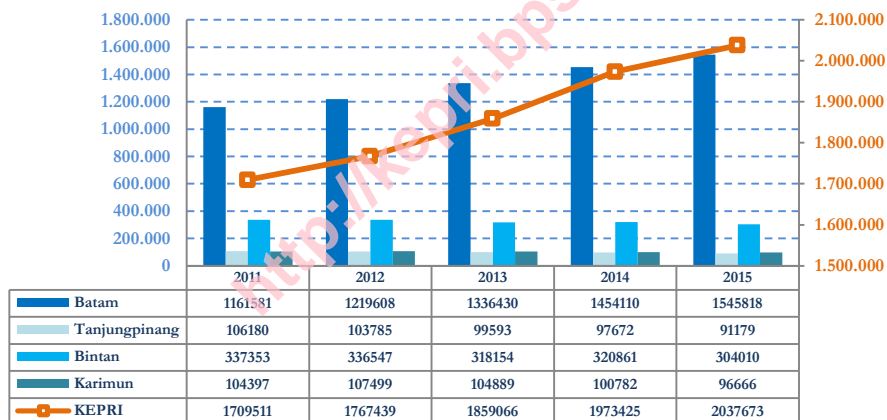
Sumber : Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

F. Wisata Bahari

Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan yang dapat menjadi penggerak beberapa kategori dalam PDRB, seperti kategori Transportasi dan Perdagangan, serta kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sebagai daerah kepulauan, Provinsi Kepulauan Riau memiliki banyak tempat wisata bahari yang menjadi daya tarik bagi kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

Gambar 2.13

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011-2015



Sumber : Survei *Inbound-Outbond Tourism* 2011-2015, BPS Provinsi Kepulauan Riau

Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau terus meningkat dari tahun 2011 sampai 2015 dengan rata-rata peningkatan sebesar 4,5 persen per tahun. Mayoritas wisatawan mancanegara masuk melalui Kota Batam, yaitu rata-rata sebesar 71,7 persen setiap tahunnya.

Hotel atau akomodasi memegang peranan penting untuk meningkatkan kedatangan wisatawan mancanegara ke lokasi pariwisata suatu daerah. Jumlah hotel di Provinsi Kepulauan Riau pada akhir tahun 2015 sebanyak 426 perusahaan/usaha yang terdiri dari 84 hotel berbintang dan 342 hotel non bintang. Sebagian besar hotel atau akomodasi berada di Kota Batam, yaitu sebanyak 190 perusahaan/usaha atau sebesar 44,6 persen dari total hotel atau akomodasi di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.8
*Jumlah Hotel Bintang dan Non Bintang
 Menurut Kabupaten/Kota
 Tahun 2015*

Kabupaten/Kota	Banyaknya Hotel		Jumlah
	Hotel Bintang	Non Bintang	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1 Karimun	6	63	69
2 Bintan	10	26	36
3 Natuna	0	44	44
4 Lingga	0	22	22
5 Kepulauan Anambas	0	21	21
Kota			
1 Batam	60	130	190
2 Tanjungpinang	8	36	44
Kepulauan Riau	84	342	426

Sumber : BPS, Direktori Hotel dan Jasa Akomodasi Lainnya Provinsi Kepulauan Riau 2015

Taukah Anda ?

Hotel Bintang 5 terbanyak di Kepulauan Riau terdapat di Kabupaten Bintan

Provinsi Kepulauan Riau merupakan pintu masuk wisatawan terbesar ketiga di Indonesia. Pada tahun 2015 tercatat 40 persen wisatawan mancanegara masuk ke Indonesia melalui Bali, 23 persen dari Jakarta, dan 20 persen dari Kepulauan Riau. Salah satu daya tarik wisata di Provinsi Kepulauan Riau adalah wisata bahari yang tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah daerah kabupaten/kota juga gencar membuat *event* berkelas internasional sebagai salah strategi penarik wisatawan untuk datang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk memfokuskan pembangunan di bidang pariwisata, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun arahan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Riau yang diimplementasikan ke dalam 7 (tujuh) Koridor Pariwisata Daerah yang berdasarkan keunggulan kooperatif yang terdiri dari:

1. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Batam sebagai kawasan Wisata Kota, Wisata Bahari dan Wisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*), Wisata Minat Khusus, Wisata Terpadu, Eksklusif, Wisata Agro dan Wisata Alam; dengan daya tarik penunjang : hiburan, *sport*, belanja, bahari, rekreasi, sejarah, religi, minat khusus dan ekonomi kreatif dan wilayah pengembangan antara lain di Pulau Batam, Pulau Setokok, Rempang, Galang, Galang Baru, Pulau Bulang dan Belakang Padang;
2. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Bintan sebagai kawasan Wisata Terpadu, Eksklusif, Kawasan Wisata Terbuka Umum dan Wisata Minat Khusus dengan daya tarik penunjang antara lain 1 dengan daya tarik penunjang : wisata terpadu, Spa, *Leisure park*, Taman Laut Tambelan, agro dan perikanan, hutan lindung Gunung Bintan, desa wisata, budaya, religi dan ekonomi kreatif dan wilayah pengembangan Lagoi (wisata terpadu), Trikora (wisata pantai dan minat khusus) dan Tanjung Uban;
3. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Karimun sebagai kawasan Wisata Alam, Wisata Minat Khusus dan Wisata Agro dengan daya tarik penunjang : kuliner, sejarah, budaya, *handycraft*, *island tour* dan ekonomi kreatif dan wilayah pengembangan Pulau Buru, Pulau Kundur, Pulau ari panas, Kawasan Karimun Utara, Karimun Selatan, Pulau Papan dan Kawasa Moro;
4. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Tanjungpinang sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya dan Wisata Kreatif dengan tarik penunjang budaya, sejarah, kuliner, wisata mangrove, ekonomi kreatif dan *Island tour* dan wilayah pengembangan Kota Tanjungpinang, Pulau Penyengat, Senggarang, Dompok, Kawasan Hulu Riau dan Sungai Carang

5. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Natuna sebagai kawasan Wisata Bahari, Ekowisata dan Minat Khusus dengan daya tarik penunjang budaya, minat khusus, bahari dan ekonomi kreatif dan wilayah pengembangan bunguran, Serasan dan Subi;
6. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Anambas sebagai kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata dengan daya tarik penunjang sejarah, minat khusus, bahari dan ekonomi kreatif dan wilayah pengembangan Tarempa, Iemaja, Iemaja Timur, Siantan dan Siantan Timur;
7. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Lingga sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya, Wisata Alam dan Wisata Bahari dengan daya tarik penunjang budaya, sejarah, bahari dan ekonomi kreatif dan wilayah pengembangan Dabo Singkep, Daik dan Senayang.

Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau memiliki daya tarik wisata bahari, terutama di Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Lingga. Beberapa tempat di Kepulauan Riau sudah dikenal oleh masyarakat internasional. Diantaranya adalah Pulau Bawah di Kabupaten Kepulauan Anambas yang berupa gugusan beberapa pulau membentuk laguna yang indah. Pulau Bawah berhasil menarik perhatian dunia internasional melalui julukan sebagai pulau tropis paling indah se Asia yang diberikan oleh CNN pada tahun 2012 lalu. Selain Pulau Bawah, Provinsi Kepulauan Riau memiliki beberapa *resort* kelas dunia yang berada di Kabupaten Bintan.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu pintu gerbang Indonesia yang paling strategis karena terletak di jalur perdagangan dan transportasi internasional. Keuntungan dari sisi geostrategis Provinsi Kepulauan Riau dapat dijadikan modal untuk pengembangan sektor pariwisata bahari yang dibutuhkan untuk menjadi daya ungkit sektor-sektor penggerak perekonomian dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Galery Foto Pariwisata Kepulauan Riau*

*Dikutip dari berbagai sumber

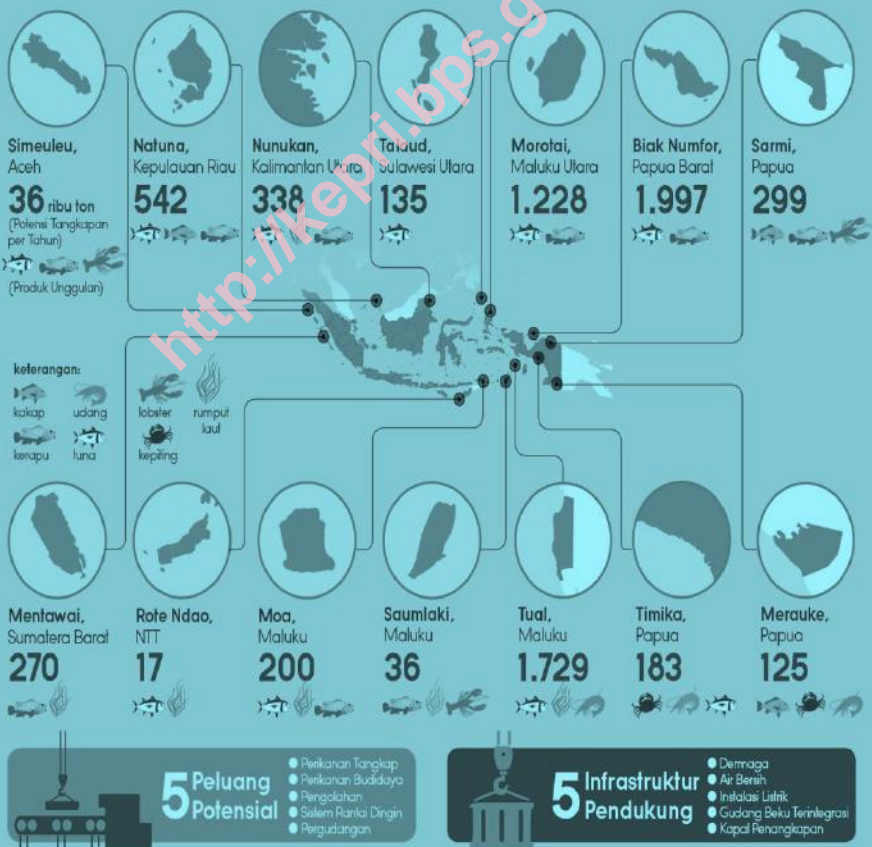


BAB III

PENUTUP

POTENSI BISNIS PERIKANAN DI BERANDA INDONESIA

Pemerintah membangun sentra bisnis kelautan dan perikanan terpadu di kawasan perbatasan. Selain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kawasan ini diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat pesisir. Berbagai sarana infrastruktur disiapkan guna memacu potensi bisnis di pintu gerbang Indonesia tersebut.



BAB 3

PENUTUP

"Provinsi Kepulauan Riau akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi bagi Republik Indonesia dimasa depan"



A. Ringkasan

Berdasarkan ulasan dan data pada bagian sebelumnya, berikut ringkasan dari potensi kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau:

1. Secara geografis, letak Provinsi Kepulauan Riau sangat menguntungkan karena berada pada jalur lalu lintas laut dan perdagangan internasional;
2. Sekitar 95 persen wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah lautan. Hal ini menjadi salah satu alasan bahwa Provinsi Kepulauan Riau akan menjadi pusat ekonomi maritim nasional dimasa yang akan datang;
3. Sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi pilar utama perekonomian Provinsi Kepulauan Riau selain sektor sumber daya alam mineral dan energi;
4. Pembangunan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau terus dilakukan secara berkelanjutan, seperti pembangunan dan perbaikan jalan raya, penambahan dan perbaikan pelabuhan laut serta Bandar Udara, peningkatan produksi dan distribusi energi listrik, dan peningkatan ketersediaan air bersih. Hal itu dilakukan untuk menciptakan iklim investasi yang positif untuk pembangunan Provinsi Kepulauan Riau;
5. Penduduk Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 sebanyak 1.973.403 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 241 jiwa/km². Kota Batam memiliki jumlah penduduk terbanyak, yaitu 1.188.985 jiwa atau sebesar 60,26 persen dari total penduduk Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki jumlah penduduk terkecil, yaitu 40.414 jiwa atau sebesar 2,05 persen dari total penduduk Provinsi Kepulauan Riau.

6. Provinsi Kepulauan Riau sedang mengalami bonus demografi dari tahun 2009-2035 yang ditandai dengan proporsi penduduk usia produktif sekitar 69 persen dengan angka ketergantungan (*dependency ratio*) sebesar 49,61 persen;
7. Persentase penduduk yang bekerja di subsektor perikanan hanya 5,8 persen dari total seluruh penduduk yang bekerja;
8. Industri Pengolahan menjadi kategori penyangga utama dalam PDRB Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan hanya berkontribusi sebesar 3,57 persen terhadap total PDRB Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015. Akan tetapi *trend* PDRB subsektor perikanan menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat dan konsisten sejak tahun 2012;
9. Berdasarkan hasil ST2013, terdapat 29.335 rumah tangga usaha perikanan tangkap dan 6.520 rumah tangga usaha perikanan budidaya yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau;
10. Masih ada 33 persen rumah tangga usaha perikanan tangkap yang menggunakan kapal tanpa motor dan 4 persen yang tidak menggunakan perahu untuk melakukan aktifitas penangkapan ikan di laut;
11. Rumah tangga usaha perikanan tangkap di Kabupten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagian besar masih menggunakan pancing sebagai alat tangkap ikan di laut. Sedangkan di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang sudah menggunakan jaring sebagai alat tangkap ikan di laut;
12. Rumah tangga usaha perikanan budidaya sebagian besar terdapat di Kota Batam (26 persen), Kabupaten Kepulauan Anambas (21 persen), dan Kabupaten Lingga (21 persen);
13. Rumah tangga usaha perikanan budidaya di Kabupten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagian besar menggunakan laut sebagai lokasi budidaya ikan. Sedangkan rumah tangga usaha perikanan budidaya di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang lebih memilih budidaya ikan di lokasi bukan laut seperti , di tambak/air payau, di kolam/air tawar, di sawah, dan di perairan umum;

14. Sebagian besar (75 persen) dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 711(WPP-RI 711) ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, terutama wilayah Laut Natuna dan Laut China Selatan;
15. *Trend* produksi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau selama 10 tahun terakhir (2005-2014) mengalami penurunan sebesar 23 persen, yaitu 181.118 ton pada tahun 2005 menjadi 139.331 ton pada tahun 2014;
16. Total produksi perikanan budidaya Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014 sebesar 27.366 ton. Jumlah tersebut turun sebesar 6,8 persen dari tahun 2013 yang mencapai 29.383 ton;
17. Ekspor ikan dan udang Provinsi Kepulauan Riau yang tertinggi selama 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2015 dan hanya sebesar 0,58 persen atau 63,84 juta US\$. Komoditi utama eksor hasil perikanan Provinsi Kepulauan Riau adalah ikan salmon. Negara tujuan ekspor hasil perikanan Provinsi Kepulauan Riau adalah Singapura dan Malaysia;
18. Provinsi Kepulauan Riau memiliki 6 kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
19. Provinsi Kepulauan Riau memiliki 1 kawasan konservasi perairan nasional yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya yang memiliki luas 1.262.686 Ha;
20. Luas terumbu karang Provinsi Kepulauan Riau adalah 278.815,41 Ha dan luas mangrove sebesar 57.670,65 Ha;
21. Provinsi Kepulauan Riau merupakan pintu masuk wisatawan terbesar ketiga di Indonesia, yaitu 20 persen dari total wisman yang masuk ke Indonesia pada tahun 2015;
22. Jumlah hotel di Provinsi Kepulauan Riau pada akhir tahun 2015 sebanyak 426 perusahaan/usaha yang terdiri dari 84 hotel berbintang dan 342 hotel non bintang;
23. Selain sektor perikanan, sektor wisata bahari dapat menjadi salah satu penyangga utama perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Riau dimasa kini dan masa yang akan datang.

B. Saran

Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional di sektor kelautan dan perikanan. Hal tersebut dikarenakan letak wilayah, kondisi geografis, serta kekayaan sumber daya alam mineral dan energi, serta potensi perikanan Provinsi Kepulauan Riau dapat dijadikan alternatif pendongkrak perekonomian selain sektor industri.

Berdasarkan ulasan dan deskripsi berbagai data yang ditampilkan pada bagian sebelumnya, berikut adalah saran untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau:

1. Meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota melalui pengadaan transportasi laut dan udara yang terjangkau bagi masyarakat;
2. Merancang program jangka panjang untuk pemerataan distribusi penduduk antar kabupaten/kota melalui program transmigrasi antar daerah. Hal ini penting dilakukan untuk memperkecil kesenjangan pembangunan antar kabupaten/kota;
3. Memperluas kesempatan kerja dengan membuka lapangan kerja untuk berbagai tingkat pendidikan, dan memberikan berbagai pelatihan kerja/*skill* lainnya kepada lulusan SMA/SMK yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan. Selain itu, pemerintah juga harus merubah cara pandang masyarakat agar lebih tertarik untuk membuka lapangan pekerjaan (wirausaha) dibandingkan menjadi tenaga buruh/pegawai/karyawan. Strategi tersebut sebagai bentuk respon pemerintah atas kondisi kependudukan Provinsi Kepulauan Riau yang sedang mengalami bonus demografi;
4. Pengelolaan perikanan tangkap harus menggunakan asas keberlanjutan (*sustainability*) untuk menjaga potensi ikan yang lestari sepanjang waktu pada suatu wilayah;
5. Strategi peningkatan perekonomian daerah melalui sektor perikanan tidak harus berorientasi kepada peningkatan jumlah produksi, melainkan peningkatan jumlah variasi produk hasil perikanan;

6. Mendorong pemberdayaan rumah tangga usaha perikanan skala kecil untuk mengembangkan usaha pengolahan hasil perikanan sebagai alternatif jumlah tangkapan ikan yang relatif lebih sedikit dibandingkan nelayan-nelayan skala besar;
7. Menjadikan peran nelayan sebagai salah satu lini terdepan penjaga kedaulatan perairan wilayah Indonesia;
8. Mengatur strategi usaha penangkapan ikan agar tidak terjadi *over fishing* di perairan pantai akibat menumpuknya kapal-kapal kecil dengan ukuran 5 GT (*gross tonnage*) ke bawah yang hanya mampu beroperasi di perairan pantai (dibawah 12 mil);
9. Pemutakhiran alat tangkap ikan bagi nelayan agar hasil tangkapan menjadi optimal;
10. Meningkatkan daya saing produk perikanan. Produk perikanan harus mampu bersaing dengan produk pangan lainnya seperti ayam dan daging sapi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana serta pengetahuan nelayan untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan dan menjaga stabilitas dan kontinuitas produksi hasil perikanan;
11. Menciptakan pasar domestik hasil perikanan tangkap. Selama ini usaha perikanan, khususnya perikanan tangkap sangat bergantung kepada pemasaran secara ekspor;
12. Menurunkan suku bunga kredit bagi nelayan skala kecil agar mendapatkan kemudahan dalam akses permodalan;
13. Memperbaiki sistem pendataan perikanan seperti data dan informasi nelayan, data jumlah tangkapan per periode, data jumlah kapal tangkap ikan, data alat tangkap yang digunakan, dan data-data pendukung lainnya. Hal ini penting karena untuk membuat kebijakan yang tepat di sektor perikanan diperlukan potret data perikanan yang terintegrasi dan *update*;
14. Membuat sistem yang harmonis antara negara/daerah asal produk perikanan dengan negara tujuan ekspor. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kejadian penolakan ekspor produk perikanan;

15. Menciptakan inovasi pengolahan produk perikanan sehingga produk perikanan yang diekspor bukan hanya dalam bentuk bahan mentah melainkan sudah berupa barang setengah jadi maupun barang jadi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan asal Indonesia;
16. Meningkatkan kampanye tentang pelestarian terumbu karang dan mangrove sebagai faktor kunci keberlanjutan potensi ikan;
17. Meningkatkan promosi keunggulan bahari Provinsi Kepulauan Riau ke mancanegara melalui *event* berkala berskala internasional.

<http://kepri.bps.go.id>

LAMPIRAN

INDONESIA, SURGA PERIKANAN DUNIA

Dengan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km², Indonesia dikenal sebagai produsen utama perikanan tangkap dan budidaya. Bahkan, beberapa komoditas unggulan seperti udang, tuna, rumput laut dan kepiting menduduki peringkat teratas dunia.



Peringkat Dunia 2014
RUMPUT LAUT
Produksi 2014 (ribu ton) 10.147
Nilai Ekspor 2014 (ribu US\$) 313

TUNA
1 1.326
510

TERSEBAR DI NUSANTARA

Empat jenis produk unggulan tersebut tersebar di berbagai wilayah Nusantara, termasuk di Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Maluku.

UDANG
2 273
1.500

KEPITING & RAJUNGAN
2 100
313



SUMBER: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP) | FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO) | SHRIMPNEWS.COM



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

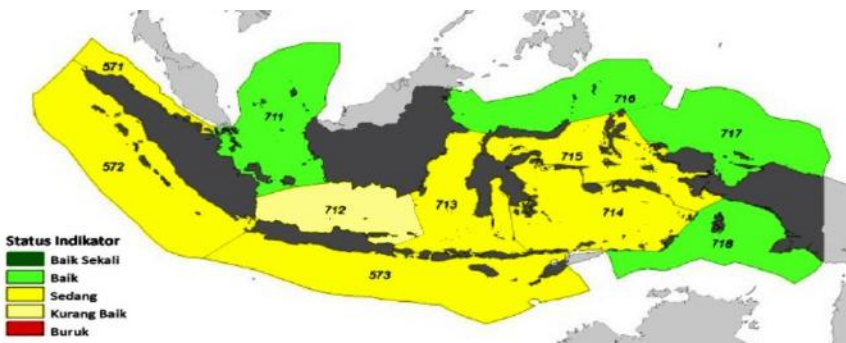
LAMPIRAN

Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI)



Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Peta Status Ekosistem Dalam Pengelolaan Perikanan di Masing-masing Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI)



Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Jl. A. Yani No. 21 Tanjungpinang 29124

Telp.: (0771) 4500155

website: kepri.bps.go.id e-mail: bps2100@bps.go.id